

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Di dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia dikenal istilah kyai, yang di beberapa tempat kata itu mempunyai makna yang berbeda-beda namun secara substansial mempunyai kesamaan. Istilah kyai merujuk kepada tokoh atau sesuatu yang dihormati oleh masyarakat (Jannah, 2015). Kyai sebagai sosok atau sesuatu yang disakralkan terdapat di dalam masyarakat Jawa, meskipun istilah kyai tidak hanya dilekatkan pada manusia namun juga pada benda yang dianggap sacral atau mempunyai daya kekuatan seperti keris, kerbau istimewa, dll (Kemendikbud, 2019). Namun makna yang lebih utama berarti tokoh teladan dalam menjalankan ajaran agama Islam (Dhofir, 2011, p. 93).

Istilah kyai bukan berasal dari bahasa Arab namun merupakan kosakata yang lahir dari budaya Jawa yang disinyalir sudah ada sejak masuknya agama Islam di Jawa. Di Indonesia terdapat beberapa istilah yang sama dengan kyai sebagai tokoh agama Islam, di antaranya ajengan pada masyarakat Sunda, teungku di Aceh, buya di Sumatera Barat, tofanrita di Sulawesi Selatan, bendara atau nun di Madura dan tuan guru di Nusa Tenggara Barat.

Fungsi kyai adalah penerus dan pewaris Nabi Muhammad SAW dalam menuntun manusia menjalankan ajaran agama Islam, untuk itu ilmu, keteladanan, dan sikap bijaksana kyai berpengaruh luar biasa terhadap masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam (Susanto, 2007, pp. 30–40). Agama Islam memberikan pedoman etika untuk berhubungan dengan Allah SWT (Arnel, 2014). Etika sebagai pedoman berperilaku tersebut tertuang di dalam kitab Alquran sebagai kitab suci umat Islam (B. Kemdikbud, 2016a). Pedoman lainnya adalah perilaku Nabi Muhammad SAW yang pada akhirnya dikodifikasi menjadi hadist (B. Kemdikbud, 2016b). AlQuran dan hadist merupakan sumber utama dalam ajaran agama Islam (Kosim, 2008). Namun untuk menguasai kedua sumber tersebut tidak mudah dan harus menguasai ilmu-ilmu bantunya. Sumber

pengetahuan di dalam agama Islam diolah dengan metode ilmu pengetahuan Islam yang lebih dikenal dengan istilah epistemologi Islam.

Dalam diskursus Epistemologi Islam dikenal adanya tiga macam ilmu, yakni *ilmu Burhani*, *ilmu Bayani*, dan *ilmu Irfani* (Mufid, 2013; Ridwan, 2016; Soleh, 2005). Ketiga metode pengetahuan dalam Islam tersebut merupakan manifestasi dari organon panca indera terutama mata (*ainun*), akal (*aqlun*), dan hati nurani (*qalibun*). Penjelasan sebagai berikut (1). *Ilmu Burhani* adalah ilmu yang dicerapkan oleh Allah langsung ke dalam pikiran dan hati nurani para nabi, cara memperoleh Ilmu Burhani adalah tanpa belajar tetapi dicerapkan oleh Allah langsung kepada akal dan Nurani para nabi. Ilmu ini didasarkan pada teks dan otoritas ulama salaf dalam mengolah sumber pengetahuan Islam. (Soleh, 2018). (2) *Ilmu Bayani* adalah ilmu yang memerlukan penjelasan dan harus dicari sebagaimana manusia belajar di sekolah. Cara perolehannya didasarkan pada nalar logika manusia (Makiah, 2014). Adapun *Ilmu Irfani* merupakan metode esoteric (batini) yang diperoleh dari pengalaman spiritual secara langsung (Nasrullah, 2012). Dalam mengimplementasikan ketiga metode keilmuan tersebut oleh para kyai di Indonesia bisa berbeda-beda.

Utamanya, kyai merupakan sebutan untuk pemilik pondok pesantren meskipun pada perkembangan berikutnya terdapat kyai yang tidak memiliki pondok pesantren yaitu kyai desa atau kyai yang tinggal di desa. Kyai desa adalah kyai yang pernah mondok di pesantren tapi tidak membuka pesantren. Menurut Horikoshi, istilah kyai selalu merujuk pada kajian Islam kultural, yang berfungsi sebagai penjaga sistem tradisional yang berada di masyarakat, misalnya dalam pelaksanaan kegiatan agama Islam yang pada umumnya sudah bercampur dengan budaya setempat misalnya pelaksanaan selamatan, puji-pujian, dan perayaan hari besar umat Islam di beberapa daerah yang berbeda-beda namun secara substansi memiliki makna yang sama. (Horikoshi & Wahid, 1987),

Perjuangan kyai dalam membumikan ajaran Islam melalui jalur kultural tersebut didasarkan pada jejak penyebar Islam di Nusantara yaitu walisongo. Sehingga kyai dan walisongo mempunyai pola yang sama dalam membumikan

ajaran Islam di Nusantara. Ajaran agama Islam yang harus dilaksanakan secara menyeluruh menuntut kyai untuk tidak hanya mengurus persoalan agama namun juga persoalan kehidupan yang berkaitan dengan agama. Persoalan tersebut tidak bisa dihindari karena tuntutan ajaran agama Islam yang tidak hanya mengatur manusia dalam berhubungan dengan Allah SWT namun juga berhubungan dengan sesama manusia bahkan dengan segala ciptaanNya.

Ketika seorang umat Islam menjalankan ibadah lalu terbentur dengan kepentingan masyarakat, maka agama Islam bertemu dengan persoalan sosial. Ketika umat Islam menjalankan ibadah terbentur dengan kepentingan negara maka agama Islam bertemu dengan persoalan politik. Dalam banyak persoalan yang mengharuskan adanya peran kyai untuk memberi penerangan terkait implementasi ajaran agama Islam maka kyai bertemu dengan persoalan fiqih. Persoalan Fiqih ini jauh lebih kompleks dari pada persoalan tauhid.

Perjalanan kyai dalam sejarah bangsa Indonesia dipenuhi dengan berbagai persoalan. Sebelum kemerdekaan Indonesia, peran kyai selain sebagai penuntut ajaran agama Islam juga sebagai penggerak bahkan pemimpin perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan 1945. Puluhan bahkan ratusan ribu bangsa Indonesia berani merelakan nyawanya di medan perang melawan penjajah atas motivasi para kyai. Para pahlawan rela berperang untuk penegakan ajaran agama Islam dengan tujuan *fi sabilillah* atau berjuang di jalan Allah SWT dengan motivasi dari kyai. Salah satu pertempuran sengit yang menentukan masa depan Indonesia adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Waktu itu, Bung Tomo berteriak Allahu Akbar untuk membangkitkan semangat arek-arek Suroboyo. Berabad-abad lamanya bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaannya, sehingga akhirnya atas berkat rahmat Allah SWT, kemerdekaan bisa diraih pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, peran kyai tetap tinggi dalam menghadapi persoalan yang sangat kompleks, baik menghadapi persoalan sosial budaya, sosial ekonomi maupun sosial politik.

Salah satu bukti kongkret sejarah, para kyai terlibat aktif dalam rapat BPUPKI dan PPKI yang merumuskan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara

ke dalam prinsip hidup bersama yang dikenal dengan Pancasila. Dalam hal ini, semua agama mengatur dua aspek kehidupan yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya dan kehidupan manusia dengan sesama manusia. Kedua aspek tersebut digambarkan ke dalam kehidupan dunia dan akhirat, yang saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain. Hubungan antara kedua konsep tersebut diuraikan melalui kitab suci masing-masing agama dengan bantuan tafsiran dari para ahli agama. Di dalam agama Islam salah satu contoh hubungan itu adalah hubungan persoalan politik di dunia dengan persoalan akhirat. Politik merupakan persoalan dunia yang didalamnya dilingkupi oleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka politik dan agama tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Ulama atau kyai dalam tradisi Jawa sebagai tokoh utama agama Islam tidak akan terlepas dengan politik. Bahkan menurut Aristoteles, manusia secara umum adalah *zoon politicon*. Dalam hal ini politik merupakan bagian inhen dari ajaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW telah mengimplementasikan politik Islam dengan mendirikan negara Madinah, walaupun menurut Nurcholish Madjid itu adalah masyarakat Madinah. Disebut negara Madinah atau masyarakat Madinah hanyalah karena perbedaan sudut pandang. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari sudut pandang *insider* dan *outsider* agama Islam. Pemahaman *insider* dikembangkan dari internal pemeluk agama Islam yang didasarkan pada kitab suci AlQuran dan hadist, sedangkan pemahaman *outsider* dikembangkan dari eksternal pemeluk agama Islam yang didasarkan atas bukti-bukti arkeologis serta pemahaman mereka atas agama Islam. Masing-masing pemahaman mempunyai kelebihan dan kekuarangan mengingat kebenaran sejarah bersifat relatif dan Nabi Muhammad SAW hidup lebih dari seribu tahun yang lalu.

Di dalam pemahaman sebagian tokoh Islam disebutkan bahwa kemunculan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan pembawa agama Islam sudah diriwayatkan pada kitab-kitab agama lain yang sudah ada sebelum Islam di antaranya dalam kitab Injil dan taurat. Di dalam kitab Perjanjian Baru, Yohanes (14:16, 14:26, 15:26, 16:7) yang secara makna diasosiasikan dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam Taurat atau kitab suci orang Yahudi di

Kidung Agung bab 5;16 terdapat kata dalam bahasa Hebrew “הַמְדִיִּים”(tanach, 2016) sama dengan MCHMDM yang diartikan sebagai Muhammadin atau Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad merupakan sosok manusia ideal, baik dalam perannya sebagai makhluk sosial maupun makhluk politik. Nabi telah mengajarkan politik teoritis dan politik praktis, walaupun pengajaran politik teoritis Nabi tidak seeksplicit seperti pendidikan politik zaman sekarang. Nilai-nilai moral dasar politik Nabi tidak terlepas dari sifat-sifat mulia seorang Nabi yakni pikiran, perkataan dan perbuatan yang benar (*Shiddiq*). Seorang politikus wajib memiliki integritas. Politikus pun harus dapat dipercaya (*Amanah*), Harus mampu menyampaikan pesan dengan baik dan benar (*Tabligh*), serta harus cerdas visioner (*fathonah*).

Selain nilai-nilai dasar politik, Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara secara adil dan bijaksana dalam bentuk konstitusi yang disebut sebagai *Piagam Madinah* yang merupakan perjanjian untuk mengatasi pertikaian antara kaum muslim dan non muslim (Yahudi dan kaum Pagan). Nilai-nilai dasar politik dan politik praktis ini diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya antara lain Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib atau lebih dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Perkembangan politik pasca Nabi Muhammad SAW bercorak kekhalifahan, di mana pemimpin pemerintah terpusat dan penentuan pemimpin pemerintah melalui penunjukan dan musyawarah.

Hukum (*laws*) dan nilai-nilai (*values*) ajaran Islam selalu menjadi dasar dan panduan dalam menyelesaikan setiap urusan kehidupan, baik kehidupan material maupun kehidupan spiritual, baik kehidupan sosial budaya, sosial ekonomi, maupun sosial politik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Islam pasca Nabi Muhammad SAW yakni di masa Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pada masa ini, Abu Bakar berperan dalam kodifikasi Al Quran sebagai kitab suci agama Islam. Selain itu, ia juga menjaga stabilitas politik dari orang-orang yang mengaku

nabi (*mutanabbi*), para pembangkang zakat. Kekhalifahan Abu Bakar dinilai sukses.

Sebelum Abu Bakar Ash-Shiddiq meninggal, dia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Pada masa Umar, administrasi dan sistem pemerintahan dipertegas. Selain itu, Umar memperluas wilayah Islam sampai ke Eropa. Islam menjadi kuat dan merupakan kekuatan yang diperhitungkan negara-negara dunia. Wilayah kekuasaan Islam terus meluas, hingga akhirnya mencapai puncak peradaban Islam dunia pada masa setelahnya.

Pada zaman khalifah Umar bin Khattab wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan tata pemerintahan semakin baik, akan tetapi pemerintahan Umar tidak luput dari gangguan dan pemberontakan yang berujung pada kematian Umar Bin Khattab yang dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah seorang budak dari Persia ketika Umar sedang menjadi imam shalat. Sepeninggal Umar bin Khattab terpilih Ustman bin Affan sebagai khalifah dan meneruskan perluasan wilayah Islam ke beberapa daerah. Namun perpecahan dalam tubuh umat Islam semakin terlihat sebabnya karena sebagian umat Islam tidak puas dengan kepemimpinan Ustman bin Affan yang lemah, beda sekali dengan Umar yang tegas. Stabilitas politik di dalam Madinah yang semakin memburuk berdampak pada terbunuhnya Ustman bin Affan ketika sedang membaca Al Quran. Sepeninggal Ustman bin Affan, mayoritas masyarakat Madinah memilih Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Pada masa ini perpecahan umat Islam semakin meruncing yang berujung pada munculnya perang antar kelompok pro Ali dan golongan pro Muawiyah. Perang ini memecah umat Islam menjadi tiga yakni kelompok Syi'ah yang pro Ali, kelompok Muawiyah dan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij membenci Muawiyah karena dianggap aggressor, juga membenci Ali yang mau bermusyawarah dengan kelompok Mu'awiyah yang hampir kalah.

Pasca Khulafaur Rasyidin, perkembangan Islam diteruskan oleh dinasti Bani Umayyah yang memerintah secara turun temurun dari tahun 661 sampai tahun 750 Masehi dengan ibu kota Damaskus. Diteruskan oleh Dinasti Abbasyiah sejak tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 1258 Masehi ketika orang-orang Mongol

menyerbu Baghdad dan mengeksekusi khalifah Abbasiyah terakhir. Pada waktu yang bersamaan berdiri kekhalifahan Muawiyah tahun 756 sampai tahun 1031 di Cordova Spanyol. Kemudian lahirlah Kekaisaran Turki atau Turki Utsmaniyah pada tahun 1890 sampai dengan tahun 1924 Masehi. Pembubaran kekaisaran Turki Usmani berujung pada kemunculan rezim politik baru Turki Sekuler di bawah Kemal Attaturk.

Dari paparan sejarah di atas, dapat dipahami bahwa politik merupakan bagian inheren dari Islam. Ajaran Islam, baik secara teoritis maupun secara praktis adalah mengatur kehidupan politik. Pengaturan tersebut termuat dalam kitab suci Al Quran. Sebagai kitab suci yang bersifat global, AlQuran tidak secara detail mengatur setiap aspek kehidupan manusia dan cenderung bersifat abstrak.

Ajaran politik Islam di dalam Alquran dijelaskan oleh hadist. Hadits menguraikan secara detail bagaimana politik Islam dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi setelah Nabi meninggal dunia, dan terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebudayaan pada masyarakat, maka persoalan kehidupan semakin kompleks. Akibatnya, banyak persoalan yang belum mendapatkan pemecahan melalui AlQuran dan Hadist. Sehubungan dengan itu, muncullah para ulama yang melakukan proses ijtihad. Di sinilah peran penting ulama atau kyai sebagai penerang atas persoalan tersebut melalui ijtihad.

Sebutan lapisan generasi di dunia Islam adalah berturut-turut dari Nabi Muhammad sebagai Maha Guru, sedangkan murid nabi atau orang yang bertemu dengan Nabi disebut Sahabat, di bawah sahabat adalah *Thabi'in* (pengikut), di bawah Thabiin adalah *Thabiit Tahabiin* (pengikut para pengikut). Di bawahnya lagi adalah generasi *Mutaakhirin* (generasi akhir). Kyai sekarang adalah generasi Mutaakhirin. Berdasarkan hal itu, mayoritas ulama membagi generasi Islam ke dalam beberapa jenjang, yakni Nabi Muhammad SAW, kedua generasi *Khulafaur Rasyidin*, ketiga generasi *thabi'in* yang berakhir pada awal abad 9 M, keempat masa *thabi'ut thabi'in*, dan terakhir generasi *Mutaakhirin*.

Sejak Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai berkembang pesat di Nusantara, telah melintasi ruang dan waktu, dari ruang

budaya bangsa arab menyebar dan membaur dengan budaya bangsa-bangsa di seluruh dunia termasuk di Nusantara sampai pada waktu berabad-abad lamanya. Dalam hal ini terdapat beberapa teori yang menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Nusantara di antaranya yaitu teori Arab, teori Cina, teori Persia, teori India, dan teori Turki. Setiap teori mempunyai perodesasi yang berbeda-beda, baik dari segi waktu maupun siapa pembawa Islam ke Nusantara. Dari beberapa teori tersebut yang paling tua adalah teori Arab yang menjelaskan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad 7 atau 8 Masehi. Teori ini diperkuat oleh Buya Hamka yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada tahun 674 M yang dibuktikan dari catatan Tiongkok, selain itu pada abad 7 M di selat Malaka sudah ramai dilintasi oleh pedagang-pedagang muslim.

Sejarah masuknya Islam di Nusantara menjadi sangat penting untuk mengetahui hubungan politik dan diplomatik antara masyarakat Nusantara dengan para pendatang dari Arab. Apalagi pasca Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin tepatnya pada masa Ali bin Abi Thalib, Islam sudah terpecah ke dalam beberapa golongan yang pada akhirnya menjadi corak atau aliran di dalam ajaran Islam. Setiap aliran mempunyai perspektif yang berbeda dalam mereinterpretasi teks-teks ajaran agama Islam. Perbedaan tersebut mengakibatkan cara pandang umat Islam terhadap politik juga berbeda. Terdapat perdebatan aliran Islam yang masuk di Nusantara di antaranya yaitu aliran Syiah dan aliran Ahlussunnah Wal Jama'ah, namun Buya Hamka menegaskan bahwa Islam yang pertama masuk ke Nusantara adalah Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, hal ini dibuktikan dengan mahzab Syafi'i yang sudah menjadi mahzab resmi di kerajaan Pasai dan Malaka. Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang yang sekaligus ulama sedangkan penyebarannya mengalami berbagai proses kebudayaan dari yang menikahi kaum bangsawan setempat sampai menjadi penasihat seorang raja. Perbedaan yang paling menyolok dari penyebaran Islam di Indonesia jika dibandingkan dengan di beberapa wilayah di dunia yaitu bahwa Islam masuk ke Indonesia tidak melalui kekerasan atau penjajahan. Berbeda dengan Kristen yang masuk melalui penjajah yang bertujuan untuk menguasai wilayah di Nusantara.

Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan oleh ulama-ulama asli Nusantara yang sudah belajar Islam di Makkah atau Madinah dan ulama yang berasal dari Arab, Persia serta Turki. Penyebar Islam yang dikenang oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia dan mempunyai jejak sampai saat ini yaitu Walisongo. Para peneliti sepakat bahwa proses pengenalan Islam kepada masyarakat di Nusantara pada mulanya tidak melalui pengajaran syariat namun melalui tauhid dan tasawuf dan setelah itu barulah diajarkan syariat. Proses penyebaran islam pada masa Walisongo melalui proses kebudayaan dan politik yang santun tanpa menghilangkan khasanah budaya bangsa di Nusantara yang baik. Sarana utama untuk melestarikan ajaran agama Islam yang digunakan oleh Walisongo untuk penduduk di Nusantara yaitu melalui pondok pesantren yang pada akhirnya tumbuh, berkembang, sebahagiannya hilang dan tumbuh lagi sampai saat ini.

Pondok pesantren sebagai lembaga tradisional pendidikan tertua di Indonesia merupakan hasil pertemuan dari tiga khasanah kebudayaan yaitu kebudayaan Hindu-Budha, kebudayaan Islam, dan kebudayaan asli nusantara. Pertemuan ketiga khasanah kebudayaan tersebut merupakan bukti bahwa cara penyebaran Islam oleh Walisongo memperhatikan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat atau karifan lokal. Melalui kebudayaan itu Walisongo tidak secara frontal mengubahnya budaya lokal dengan budaya Islam yang oleh sebagian orang identik dengan budaya Arab, secara perlahan Waisongo mengganti segala apa-apa yang kurang baik menjadi lebih baik. Dengan cara Walisongo itu, Islam dapat diterima oleh masyarakat sekitar dan terus menyebar dengan cepat di Nusantara.

Model penyebaran Islam Walisongo ini diteruskan oleh murid-muridnya yang tersebar di Nusantara. Sebagian murid meneruskan perjuangan Walisongo dengan mendirikan pesantren, dan sebagian lagi menyebarkannya secara langsung di desa-desa. Dari sinilah muncul istilah kyai pesantren dan kyai desa. Ulama pesantren giat membina santri di lingkungan pesantren, sedangkan kyai desa membina jemaah masjid di desa-desa. Semangat Walisongo tidak hanya

mengilhami para ulama setelahnya dalam menyebarkan agama Islam tapi juga mengilhami munculnya para ulama pejuang kemerdekaan Indonesia. Para pejuang tersebut di antaranya Tuanku Tambusai dari Riau yang memimpin masyarakat untuk melawan penjajah Belanda.

Nama lain adalah; Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat yang memimpin perlawanan terhadap Belanda melalui perang Padri; KH. Syam'un pendiri pesantren Al-Khairiyah Cilegon Banten yang bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang memimpin perlawanan atas Belanda di Banten; KH Samanhudi pendiri Sarekat Dagang Islam (SDI) yang pada mulanya merupakan asosiasi pedagang muslim di Nusantara; KH Abdul Halim Majalengka aktivis kemerdekaan sekaligus ulama yang merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI); KH Abdul Wahab Hasbullah pejuang kemerdekaan sekaligus ulama yang mendirikan organisasi Nahdhlatul Ulama (NU), serta nama-nama lain sebagai ulama hebat tetapi tidak ditulis lengkap di dalam sejarah, mereka merupakan pelopor perjuangan sampai Indonesia menjadi negara merdeka. Selain kyai atau ulama, terdapat juga pemimpin kerajaan yang menjadi pahlawan perjuangan sampai kemerdekaan bangsa Indonesia, di antaranya adalah Teuku Umar dan isterinya Cut Nyak Dien yang berasal dari Aceh yang memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda melalui strategi gerilya; Pangeran Diponegoro dari kesultanan Yogyakarta yang menyatukan masyarakat Jawa untuk memimpin perang melawan penjajah Belanda.

Ulama atau kyai Nusantara sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai penerus perjuangan Walisongo memikul beban tanggung jawab yang amat berat karena bertugas memimpin pelaksanaan ajaran Islam, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia, baik dalam persoalan *ibadah mahdlah* maupun *ghair mahdlah* atau mu'amalah termasuk persoalan sosial politik. Seluruh ajaran Islam bersifat inhern di mana satu bidang dengan bidang lainnya saling menyatu, holistik. Politik merupakan bagian tak terpisahkan dari *hablum minannas* dalam kerangka kehidupan berbangsa dan

bernegara. Oleh karena itu, politik harus dilandaskan pada nilai moral yang bersumber pada ajaran agama.

Kyai yang berada di daerah manapun dengan sebutan apapun memiliki tugas yang sama yaitu meletakkan landasan politik melalui pembinaan nilai dan moral yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Itulah sebabnya sejak sebelum kemerdekaan, para kyai pesantren dan kyai desa merupakan pelopor perjuangan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi karena perjuangan yang berlangsung berabad-abad itu bersifat sporadic, tidak ada kesatuan komando nasional, tidak dilakukan secara terkoordinasi di seluruh Nusantara, maka dengan mudah dipatahkan oleh penjajah.

Sebenarnya, sebelum bangsa-bangsa penjajah datang ke Nusantara, yakni Portugis pada awal abad 16 Masehi, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol pada pertengahan abad 16 Masehi, dilanjutkan oleh Belanda, agama Islam sudah berkembang di Nusantara, salah satu buktinya adalah berdirinya kerajaan Islam di Nusantara antara lain kerajaan Perlak (Peureula) yang didirikan pada abad 9 Masehi dan kerajaan Samudera Pasai yang didirikan pada abad 13 Masehi. Kedua kerajaan tersebut terletak di Sumatera. Sedangkan di Jawa terdapat kerajaan Islam Demak yang didirikan pada abad 15 Masehi. Sejak itu, sejalan dengan masuknya para penjajah ke nusantara, berdirilah beberapa kerajaan Islam. Perkembangan Islam tersebut tidak terlepas dari peran utama Walisongo yang tersebar di berbagai daerah di Nusantara. Walisongo merupakan majelis dakwah yang dibentuk oleh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) pada awal abad 15 M dan berada pada rentan waktu antara tahun 1404 sampai tahun 1650, sejak sebelum penjajah masuk ke Nusantara sampai pada awal abad 17 Masehi.

Keberadaan walisongo sebagai penyebar agama Islam mempunyai pengaruh yang kuat dikarenakan bertepatan dengan mulai surutnya pengaruh agama Hindu dan Budha di Nusantara yang ditandai dengan perubahan bentuk dari kerajaan menjadi kesultanan di beberapa daerah. Pasca Walisongo kekuasaan Belanda melalui VOC semakin menekan bangsa Indonesia. VOC adalah persekutuan pedagang asal Belanda yang dibentuk pada 20 Maret 1602 untuk

wilayah Hindia Belanda yang bertujuan mendominasi perdagangan di Asia dan mengamankannya dari pihak Portugis dan Spanyol. Tujuan VOC tersebut kemudian berubah menjadi penguasaan melalui cara memonopoli wilayah yang menghasilkan rempah-rempah di Nusantara. Monopoli ini dilalui dengan jalan diplomasi dan politik adu domba atas kepentingan raja yang diberontak atau rakyat yang memberontak, kedua sisi ini dimanfaatkan untuk tujuan dominasi kekuasaan atas wilayah penghasil rempah-rempah serta mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Setelah mendapatkan hak kuasa atas daerah tersebut, VOC membuat kebijakan yang menyudutkan warga sekitar kerajaan.

Ketika terjadi pemberontakan dari masyarakat sekitar, VOC menggandeng masyarakat sekitar yang mempunyai kekuatan untuk melawan para pemberontak. Strategi *divide et impera* Belanda ini berhasil melemahkan kekuatan bangsa-bangsa di Nusantara. Perjuangan yang mengedepankan kepentingan kelompok, atau bersifat kedaerahan gampang diadu domba. Seandainya hal itu dilakukan terus menerus oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia, niscaya negara Indonesia tidak akan pernah merdeka.

Menjelang Indonesia merdeka, ternyata negara Islam Indonesia bukan menjadi pilihan mayoritas para pendiri bangsa mengingat terdapat kaum minoritas yang memeluk agama di luar Islam. Dengan argumentasi untuk meneguhkan serta menjaga keutuhan bangsa dan negara republik Indonesia, dibuatlah landasan hidup berbangsa dan bernegara yang diberi nama Pancasila dan secara normatif di letakkan pada pembukaan UUD 1945. Egosentris pemikiran politik Islam atas dasar aliran dikesampingkan demi keutuhan bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah oleh bangsa asing.

Melalui BPUPKI dan PPKI Pancasila dan UUD 1945 disepakati sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara. Namun pemikiran politik Islam dalam konsep bernegara meruncing pasca diraihnya kemerdekaan dan didirikannya Negara Republik Indonesia. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memimpin Darul Islam, sebuah organisasi yang bertujuan untuk menegakkan negara Islam Indonesia, untuk pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia. Pada tahun

1962 Kartosoewirjo dapat dilumpuhkan melalui operasi yang diberi nama “pagar betis sapu lebu” yang dilakukan oleh Tentara dan rakyat di bawah komando Abdul Haris Nasution. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam perkembangan Islam di Indonesia juga terdapat perbedaan pemikiran dalam politik terutama politik kenegaraan. Perbedaan ini diklarifikasi melalui organisasi kemasyarakatan Islam yang sudah terbentuk bahkan sebelum kemerdekaan negara republik Indonesia. Di antara organisasi kemasyarakatan tersebut yang besar adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang pada mulanya yaitu Nahdlatul Waton.

Pemikiran politik kyai dapat ditelusuri dari masa pra kemerdekaan (sebelum 1945) sampai pasca reformasi (1998), yang berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi pada masa itu. Banyak kyai di Nusantara belajar agama Islam langsung dari Makkah, Madinah dan sekitarnya yang mempunyai beragam aliran seperti Syiah, Sunni, dan Khawarij. Implikasinya kepada perkembangan Islam di Nusantara cukup beragam dari mulai munculnya aliran yang lunak, fleksible sampai aliran keras. Perbedaan pemikiran tersebut juga berdampak secara langsung kepada pemikiran politik Islam di Indonesia.

Kartosuwirjo mempunyai keyakinan untuk terciptanya Negara Islam Indonesia (NII) dalam sistem kenegaraan bangsa Indonesia. Sebaliknya, Soekarno memaknai hubungan negara dan agama Islam bahwa agama merupakan urusan privat antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Model perbedaan pemikiran tersebut sudah ada sejak Indonesia merdeka dan semakin meruncing pasca era Reformasi. Dalam hal ini perlu dicatat, telah terjadi pergeseran mendasar bahwa sebagian kyai tidak lagi berperan sebagai benteng moral politik, malah justru kyai terjun aktif dalam dunia politik praktis.

Pada setiap pemilihan umum (Pemilu), suara kyai dan santri selalu diperebutkan, bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam melainkan oleh partai-partai politik berbasis nasionalis. Dalam upaya meraup simpati dari kalangan Islam yang menjadi pengikut setia kyai, banyak partai politik yang menempatkan kyai dan tokoh pesantren pada jajaran pengurus partai dengan harapan dapat menjadi magnet dalam pemilu. Kecenderungan menarik dukungan

kyai dan tokoh-tokoh pesantren tersebut memperlihatkan bahwa nilai politik kyai di hadapan para politisi dalam upaya mereka membangun basis dukungan ataupun sekedar legitimasi bagi kepentingan politiknya masih cukup tinggi. Legitimasi mendatangkan kepercayaan publik. Masuknya kyai dalam politik praktis memiliki dampak positif yaitu kyai dapat mengembangkan praktek politik yang sehat dan mengembangkan politik Islam, namun di sisi lain memiliki dampak negatif karena kyai yang masuk wilayah politik praktis dinilai cacat oleh sebagian masyarakat, lebih-lebih ketika terjadi kyai yang berpolitik itu tersandung kasus-kasus hukum seperti korupsi.

Akibat lebih dahsyat lagi, kyai yang masuk dalam wilayah politik praktis menjadi tidak baik citranya, sehingga partisipasi para santri untuk mengikuti pilihan kyainya cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat melalui hasil penelitian yang menyebutkan bahwa antara tahun 2004 sampai tahun 2014 partisipasi politik santri di antaranya dalam pemilu, terjadi penurunan yang signifikan dari 84% menjadi 25%. Salah satu penyebab penurunan tersebut di antaranya semakin tingginya sikap apatis santri terhadap calon yang akan dipilih (Rinoto Adji, 2014, p. 8) walaupun pada dasarnya perilaku politik santri tidak terlepas dari peran kyai karena kyai di hadapan santrinya merupakan tokoh panutan penebar keilmuan dengan kharismanya hingga tidak berlebihan fatwa-fatwanya dianggap sakral dan sulit ditolak sebagai bentuk ketaatan yang secara teologis memiliki dasarnya.

Politik adalah urusan dunia tetapi terkait erat dengan akhirat. Politik merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi kepada orang yang dinilai amanah atau dinilai mampu meneruskan aspirasi. Akan tetapi, dalam hal ini, pilihan seorang kyai dalam memilih seorang kandidat atau salah satu partai, tidak dapat dijamin memiliki argumentasi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, bisa jadi alasannya hanya mengada-ada. Dengan demikian, sangat naif jika pilihan santri berbeda dengan pilihan kyainya, dianggap melawan fatwa ulama.

Sikap politik Kyai bisa sangat besar mempengaruhi partisipasi politik santri karena budaya politik di pesantren masih cenderung parokial. Hal ini dibuktikan pada hasil penelitian Dista Adistia yang mengkaji perihal pengaruh

sikap politik kyai pada sikap politik santri melalui pemilihan umum walikota dan wakil walikota Bandar Lampung. Santri Pondok pesantren Al-Hikmah yang termasuk dalam pesantren tradisional cenderung mengikuti sikap dan anjuran kyai dalam menentukan pilihan politiknya (Adistia, 2016, p. 4). Sebenarnya hal itu menunjukkan belum adanya kedewasaan dalam berpolitik.

Kedewasaan berpolitik tidak lain adalah proses penentuan yang didasari pertimbangan rasional, bukan sekedar ikut-ikutan apalagi hanya mengejar target pragmatisme sesaat yang tidak diimbangi sebuah komitmen publik antara yang dipilih dengan para pemilih. Politik juga bukan sekedar perebutan kekuasaan, tapi merupakan media pencerahan dan pembebasan umat dari keterpurukan. Semua warga negara yang telah ikut berjuang mendirikan Negara Kemerdekaan Republik Indonesia juga para santri sebagai salah satu potensi kekuatan politik di Indonesia ingin mengalami perbaikan kehidupan, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk pembangunan Nasional,

Pengetahuan para santri tentang peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan politik berada pada level sedang dan rendah, mereka hanya memahami aturan dan kebijakan pemerintah sebatas apa yang berkaitan dengan dirinya sebagai anggota masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman tentang persoalan politik yang mereka miliki bersumber dari media massa. (Rachmiate, Ahmad Sidik, & Kamil, 2005, pp. 196–216). Santri hendaknya bersikap kritis dan menghindari sikap akomodasionis yang disebabkan oleh budaya paternalistik yang biasa dianut di dunia pesantren. Selama ini paradigma pesantren sebagai kerajaan kecil dengan kyai sebagai rajanya, kyai dianggap sebagai sumber mutlak segala aturan yang berlaku sehingga sabdanya harus ditaati para santri tanpa ada tawar-menawar.

Kyai dalam posisinya sebagai pimpinan pesantren memiliki otoritas dalam segala lini kehidupan pesantren termasuk otoritas politik. Tradisi ini menjadikan santri tidak bisa menyalurkan aspirasi politiknya dengan bebas sesuai dengan hati nuraninya. Mengingat persoalan di atas, maka hendaknya kyai memberikan pembelajaran politik yang baik dan benar kepada santrinya bukan justru

membungkam santrinya. Kebebasan merupakan hak segenap warga masyarakat tanpa terkecuali, agama juga memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menentukan jalan hidupnya. Pembelajaran politik merupakan suatu keniscayaan kepada masyarakat, tentunya pembelajaran politik yang baik, beretika, dan menjunjung tinggi nilai-nilai pluralitas, sehingga tidak ada pemaksaan dalam berpolitik, baik pemaksaan secara langsung maupun tidak langsung.

Demokrasi sebagai sebuah sistem yang dianut oleh Negara Indonesia memungkinkan memberikan akses kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam politik praktis. Kyai sebagai *warasatul anbiya* merupakan penerang bagi umat Islam di Indonesia sekaligus sebagai fondasi politik warga negara telah terbukti secara sejarah mengawal bangsa Indonesia menggapai kemerdekaan. Untuk itu harus pada posisi yang ideal sebagai negarawan yang mengedepankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia sebagai pemangku kewajiban yang terdapat pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun fenomena yang terjadi pasca reformasi membuka peluang bagi siapapun untuk berekspresi yang berimplikasi pada munculnya berbagai pemikiran politik Islam yang seringkali membingungkan umat Islam.

Dari berbagai hasil penelitian terkait pendidikan politik di pesantren salaf standar yang digunakan adalah sistem pendidikan nasional yang secara mendasar berbeda dengan sistem pendidikan salaf yang telah lahir lebih dahulu dari sistem pendidikan nasional. Berbagai penelitian tersebut selalu mengevaluasi pendidikan di pondok pesantren salaf kurang memenuhi standar pendidikan nasional dan terkesan memojokkan sistem pendidikan pesantren salaf, namun tidak menekankan pentingnya pembentukan jiwa warga negara yang memiliki rasa aku punya negara (Badrudin et al., 2018; Hakim et al., 2021; Hanipudin, 2019; Hendri, 2020; Hermawan & Ngindana, 2020; Nur Jannah, 2019; Siregar, 2018; Untung, 2017). Oleh sebab itu menurut hemat peneliti sangat penting mengkaji Konstruksi Pemikiran Politik Kyai Terhadap Pendidikan Politik Santri dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah seorang muslim.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Setelah pemaparan di atas dapat diidentifikasi beberapa persoalan penting antara lain bahwa epistemology Islam itu terdiri dari ilmu Burhani, ilmu Bayani dan ilmu Irfani. Ketiga jenis ilmu itulah yang dimiliki oleh para kyai pada umumnya. Di dalam ketiga ilmu itu diketahui bahwa persoalan politik merupakan bagian inherent dari ajaran Islam holistik. Nabi Muhammad telah memberikan ajaran politik, baik politik teoritis maupun politik praktis. Dalam hal ini, kyai sebagai pewaris Nabi tidak bisa melepaskan diri dari persoalan politik. Para kyai/ulama di Nusantara memegang peran politik, baik pada masa pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Pasca reformasi tahun 1988, banyak kyai yang terlibat dalam politik praktis, baik di partai maupun dalam pencalonan sebagai anggota legislatif bahkan presiden. Telah terjadi pergeseran paradigma politik kyai yang mengikuti fenomena politik pada masanya, namun tidak sedikit paradigma kyai yang melampaui zamannya. Pergeseran paradigma tersebut mengakibatkan lahirnya fenomena politik kyai dan kyai politik. Selanjutnya pemikiran politik kyai bertransformasi ke dalam dua bentuk keterlibatan dalam politik, yakni gerakan pemikiran politik dan gerakan politik praktis. Sejak Reformasi 1998 telah mengubah paradigma masyarakat Indonesia yang semula sebagai masyarakat religius menjadi masyarakat materialistik. Implikasinya banyaknya kyai yang terlibat kasus korupsi. Hal ini dapat menurunkan citra kyai Nusantara sebagai pewaris Nabi sekaligus sebagai penerus perjuangan Walisongo.

## 1.3. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengungkap dua isu pokok (*mainstream*) yakni isu Konstruksi Pemikiran Politik Kyai dan isu implikasi pemikiran politik kyai terhadap pendidikan politik santri. Berdasarkan dua isu tersebut dirumuskanlah pokok-pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan dan konstruk pemikiran politik kyai di Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah, Pondok Modern Darul Hikmah, Pondok Pesantren Tebu Ireng?
2. Mengapa pemikiran politik kyai di Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah, Pondok Modern Darul Hikmah, Pondok Pesantren Tebu Ireng berbeda?
3. Sejauh mana implikasi pemikiran politik kyai terhadap pendidikan politik santri di Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah, Pondok Modern Darul Hikmah, Pondok Pesantren Tebu Ireng dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui konstruksi Pemikiran Politik Kyai dan implikasinya dalam pendidikan politik santri di Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah Kabupaten Tulungagung, Pondok Modern Darul Hikmah, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Adapun secara khusus, tujuan penelitian ini untuk:

1. Mendeskripsikan landasan dan konstruk pemikiran politik kyai di Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah, Pondok Modern Darul Hikmah, Pondok Pesantren Tebu Ireng?
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pemikiran politik kyai di Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah, Pondok Modern Darul Hikmah, Pondok Pesantren Tebu Ireng dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?
3. Mengelaborasi implikasi pemikiran politik kyai terhadap pendidikan politik santri di Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah, Pondok Modern Darul Hikmah, Pondok Pesantren Tebu Ireng dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?

#### **1.5. Signifikansi dan Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian Konstruksi Pemikiran Politik Kyai Terhadap Pendidikan politik santri di Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah, Pondok Modern Darul Hikmah, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng dijabarkan dalam empat segi sebagai berikut;

### **Segi Teoritis**

Secara teoritis penelitian Konstruksi Pemikiran Politik Kyai pada pendidikan politik santri di Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah, Pondok Modern Darul Hikmah, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng berperan dalam pengembangan teori pendidikan kewarganegaraan domain sosial kemasyarakatan dan teori politik islam Indonesia. Dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dikembangkan lebih lanjut berkaitan dengan pemikiran politik islam.

### **Segi Kebijakan**

Dalam segi kebijakan penelitian Konstruksi Pemikiran Politik Kyai terhadap pendidikan politik santri di Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah, Pondok Modern Darul Hikmah, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng bermaksud memberikan rekomendasi kebijakan kepada kementerian agama bagian diniyah dan pesantren untuk mengembangkan potensi pendidikan pesantren salaf agar diakui secara formal sama dengan pendidikan formal.

### **Segi Praktis**

Secara implementatif penelitian Konstruksi Pemikiran Politik Kyai terhadap pendidikan politik santri di Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah, Pondok Modern Darul Hikmah, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng dapat digunakan sebagai kerangka ideal pemikiran politik tokoh agama.

### **Segi Isu dan Aksi Sosial**

Dari aspek sosial kemasyarakatan penelitian Konstruksi Pemikiran Politik Kyai terhadap pendidikan politik santri di Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah, Pondok Modern Darul Hikmah, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng menegaskan kembali pentingnya Kyai dalam pendidikan dan pembinaan politik

warga negara agar dapat memberikan pengetahuan, komitmen, dan keteladanan yang baik dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disertasi ini mengacu kepada ketentuan penulisan baku sesuai dengan ketentuan yang terdapat di pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia. Secara umum struktur organisasi penulisan tersebut terdiri dari bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab keempat temuan dan pembahasan, dan bab terakhir yaitu kelima simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Bab tersebut secara terperinci dijelaskan pada paragraf berikut ini.

Bab pertama (BAB I) pendahuluan yaitu bab yang didalamnya menguraikan dan menjelaskan secara rasional teoritis mengenai landasan dilakukannya penelitian Konstruksi Pemikiran Politik Kyai Pada Pendidikan Politik di Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah, Pondok Modern Darul Hikmah, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Landasan tersebut diuraikan dalam sub bab latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Sub bab latar belakang berisi rasionalitas dan urgensi penelitian, sub bab identifikasi masalah merupakan penekanan terhadap persoalan-persoalan utama yang terdapat di latar belakang yang selanjutnya diformulasikan ke dalam sub bab berikutnya yaitu rumusan masalah yang dalam penelitian ini. Sub bab tujuan penelitian merupakan penjelasan arah penelitian ini, dan sub bab terakhir yaitu sistematika penulisan yang berisi uraian organisasi penulisan disertasi.

Bab kedua (BAB II) kajian pustaka yaitu bab yang menjelaskan konsep, generalisasi, teori, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini untuk mengkaji hasil penelitian serta paradigma sebagai landasan dalam mengkonstruksi hasil penelitian ini. Konsep, generalisasi dan teori yang dimaksud dalam penelitian ini dijelaskan dalam sub bab yang terdiri dari perkembangan islam indonesia, epistemologi islam, konsep pendidikan islam, teori politik islam,

pondok pesantren, teori pendidikan politik, konsep manusia pancasila, teori lifelong learning education, dan pendidikan politik dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Untuk memperjelas letak dan posisi penelitian ini dalam penelitian yang sebidang yang sudah dilakukan peneliti lainnya maka terdapat sub bab yang menguraikan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Dan sub bab terakhir paradigma penelitian merupakan rambu-rambu yang digunakan sebagai koridor dalam penelitian ini.

Bab ketiga (BAB III) metode penelitian yaitu bab yang menjelaskan dengan cara apa dan bagaimana penelitian ini dilakukan yang dirinci dalam sub bab diantaranya adalah sub bab desain penelitian, sub bab subjek dan lokasi penelitian, sub bab instrumen penelitian, sub bab pengumpulan data, sub bab analisis data, sub bab keabsahan data, dan terakhir jadwal penelitian. Sub bab tersebut merupakan formulasi teknis penelitian konstruksi pemikiran politik kyai pada pendidikan politik santri di pondok pesantren putra menara al fattah, pondok modern darul hikmah, dan pondok tebu ireng.

Bab keempat (BAB IV) temuan dan pembahasan yaitu bab yang menjelaskan temuan-temuan penelitian yang secara deskriptif selaras dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan pada BAB I. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan konsep dan teori serta penelitian terdahulu yang relevan, yang selanjutnya dikonstruksi sesuai dengan paradigma penelitian kemudian disajikan dalam sub bab dalam bab ini yang terdiri dari sub bab deskripsi lokasi penelitian, sub bab identitas subjek penelitian, sub bab temuan penelitian, dan terakhir sub bab pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima (BAB V) simpulan, implikasi, dan rekomendasi yaitu bab yang menjelaskan jawaban atas pertanyaan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian ini. Simpulan merupakan gambaran secara menyeluruh penelitian konstruksi pemikiran politik kyai pada pendidikan politik santri di pondok pesantren putra menara al fattah, pondok modern darul hikmah dan pondok pesantren tebu ireng. Simpulan tersebut selanjutnya digunakan

sebagai bahan pijakan dalam merumuskan rekomendasi dan implikasi dari penelitian ini.